

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM BINAAN DI PROVINSI BALI

Oleh:

**Ni Nyoman Sunariani¹⁾
AAN. Oka Suryadinatha²⁾
Ida IDM Rai Mahaputra³⁾**

ABSTRACT

UMKM in national economy play an important role and strategic for the economic growth, not only in developing countries like Indonesia but also in developed countries. Nine district of a city that has the potential strategic support revenue in the area. Local revenue Bali Province to decrease from year 2015 it is only of 41,29 %, is much lower compared to last 2014 of 60,92 %. Which is due by UMKM sector. This condition is making UMKM very reasonable and potentially more empowered. In 2010, especially UMKM sector experienced a decline in the value export from year to year, declined significantly. From research exploratif to the field, problems identification, with AHP (analitical hierarchy process) found way UMKM, in Bali Province, who improve significantly sales good for the domestic market and exports Bali Province. This empowerment, in acceleration regional economic growth, job creation and the increase in competitiveness UMKM products. The research results show factors barrier UMKM, namely capital, human resources, access banking, of the nature of products lifetime short, and the limited market access good in the market national and international. Program under the jurisdiction of UMKM in Bali Province be done in collaborate with the government, banking, soe, cooperatives, lpd, bumd, college collaborated through an incubator business. Based on the research done, can formulated policy recommendations, under the jurisdiction of program partner between the government and UMKM in Bali Province. The government needs to simplification licensing procedure, cheap and fast through one roof.

Keywords: *Empowerment, The Small and Medium Enterprises (SMES), Through the Under the Jurisdiction*

PENDAHULUAN

Provinsi Bali adalah salah satu Provinsi dari 33 (tigapuluh tiga) Provinsi yang memiliki potensi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Provinsi Bali memiliki peran penting dalam menumbuhkan pariwisata dan usaha-usaha kecil seperti Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Bali. Kontribusi sektor UMKM ini terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sangat besar, dan sebagai salah satu sektor unggulan. UMKM ini mampu menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar.

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah menjadikannya sebagai pertumbuhan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran UMKM, maka upaya pemberdayaan UMKM dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah dan pusat serta peningkatan daya saing produk UMKM.

Winarni (2006) yang berjudul "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan" bertujuan untuk mengkaji upaya untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kecil perlu dipelajari karakteristik serta permasalahan. Permasalahan UMKM adalah kurang permodalan, kesulitan dalam pemasaran dan bahan baku, kurang trampil proses produksi, kurang manajerial dan keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Adiningsih (2001) mengatakan UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan. Itu mendukung hasil penelitian Urata (2000) menunjukkan di antara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Hasil penelitian serupa oleh Syarif (2008) mengatakan terbatasnya kemampuan UMKM dalam mengakses informasi untuk mempromosikan produk UMKM.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) tahun 2020 berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru maka begitu banyak peluang kerja tumbuh. Untuk itu, penting pemerintah mendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKM sebagai program nasional mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di tahun 2016 diperkirakan jumlah pelaku UMKM terus bertambah. Selama ini, UMKM memberikan kontribusi pada PDB 58,92% dan penyerapan tenaga kerja 97,30%. (BPS, 2015). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, hingga Juni 2016 sudah ada 265.558 unit, yaitu UKM formal sebanyak 61.648 UKM dan informal sebanyak 203.910 UKM (BPS Bali, 2015). Jumlah kredit UMKM meningkat triwulan II

tahun 2015 menjadi sebesar Rp 24,82 triliun dibanding periode yang sama tahun 2014 hanya sebesar Rp 21,61 triliun yang tersebar diseluruh Kabupaten Kota di Provinsi Bali (BI, 2015). Data-data tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.

Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah kurang permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Meski jumlah usaha UMKM di Bali sangat banyak, namun masih perlu program pembinaan terutama dalam pemberdayaan pelaku UMKM yang belum maksimal. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi UMKM, maka penting dilakukan kajian tentang pemberdayaan UMKM melalui program binaan di Provinsi Bali.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat adalah:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi UMKM di Provinsi Bali.
2. Bagaimanakah upaya pemberdayaan UMKM melalui program binaan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan pelaku UMKM di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan UMKM melalui program pembinaan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM

KAJIAN TEORI

1. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Mubyarto (2002), pemberdayaan merupakan upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan

dunia perbankan. Terdapat lima misi utama dalam pemberdayaan, yaitu (1) kesadaran; (2) pengorganisasian; (3) kaderisasi pendamping; (4) dukungan teknis, dan (5) pengelolaan sistem. Sementara itu, Kartasmita (1995) mengemukakan upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga cara seperti berikut ini: (a) menciptakan iklim yang kondusif masyarakat untuk berkembang; (b) memperkuat potensi masyarakat dengan menyiapkan sarana prasarana baik fisik maupun sosial yang mampu diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah; dan (c) memberdayakan dalam arti melindungi dan membela masyarakat lemah. Pandangan Erwidodo (1999) pemberdayaan diberikan kepada pelaku ekonomi lemah untuk meningkatkan kemampuan bisnis (kewirausahaan). Esensi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Menurut UNCTAD dan UNDP dalam *Summary Creative Economics Report* (2008: 11-12) secara potensial ekonomi kreatif berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. Ekonomi kreatif dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan ekspor. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat mempromosikan aspek-aspek sosial (*social inclusion*), ragam budaya, dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Ekonomi kreatif memupuk ekonomi, budaya, dan aspek-aspek sosial yang saling berhubungan dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan-tujuan wisata.
- c. Merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang berbasis aktivitas ekonomi dengan suatu dimensi perkembangan dan keterkaitan antara tingkat makro dan mikro untuk ekonomi secara keseluruhan.
- d. Ini adalah salah satu pilihan pengembangan yang layak untuk menggugah inovasi yang multidisiplin, respons kebijakan, dan tindakan antarkementerian.
- e. Di dalam jantung ekonomi kreatif terdapat industri-industri kreatif (*at the heart of the creative economy are the creative industries*)

Barringer at al (2004) dan Maine Departemen of Economy and Communitities (2006), ekonomi kreatif dapat menciptakan kesejahteraan karena dapat menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, menciptakan pemerataan, dan mendorong pembaharuan serta memanfaatkan bahan baku lokal. Jenis kreativitas yang membentuk ekonomi kreatif, yaitu Kreativitas ilmu pengetahuan (*Scientific creativity*); Kreativitas ekonomi (*Economic creativity*); Kreativitas budaya (*Cultural creativity*); dan Kreativitas teknologi (*Technological creativity*).

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dari atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau *omzet* penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau *omzet* penjualan berkisar antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Kriteria usaha menengah memiliki kekayaan lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau *omzet* penjualan berkisar antara Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Winarti (2004) mempertimbangkan peran penting UMKM dalam berbagai aspek perekonomian dan upaya percepatan pemulihan kegiatan ekonomi, Bank Indonesia memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM. Dukungan Bank Indonesia ini termasuk juga dalam rangka mendorong pulihnya fungsi intermediasi perbankan dan menciptakan kondisi perbankan yang sehat. Sabirin (2001) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah usaha kredit mikro. Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM berubah menjadi tidak langsung. Pendekatan yang digunakan kepada UMKM bergeser dari *development role* menjadi *promotional role*. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pelatihan kepada petugas bank, penelitian dan penyediaan informasi (Setyobudi, 2007).

Berbagai kajian dan upaya-upaya pembinaan usaha ekonomi rakyat di Indonesia menurut hasil kajian BI dan Unud (2011) permasalahan yang seringkali dihadapi antara lain meliputi: akses pasar, pembiayaan usaha, rendahnya kemampuan teknik produksi dan kontrol kualitas, manajemen secara umum (BRI dan Undiknas, 2016). Shujiro Urata (2000) yang melakukan penelitian pada UKM di tujuh kota besar di Indonesia termasuk Surabaya berhasil mengidentifikasi permasalahan UKM yang meliputi: lemahnya akses pasar (29%),

keuangan (19,2%), informasi teknik dan pelatihan (19,2%), kontrol kualitas, manajemen, peralatan produksi masing-masing 9,6% dan masalah lain 4%. Selain itu menurut Ariawati (2005) kelemahan UKM dapat diklasifikasikan seperti pendidikan, permodalan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara KUKM dengan BPS (2003) di dalam Winarni (2006) menginformasikan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47 %, sisanya 27,53 % tidak ada masalah. Dari 72,47 % yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasi kesulitan yang muncul adalah (1) Permodalan 51,09 %, (2) Pemasaran 34,72 %, (3) Bahan baku 8,59 %, (4) Ketenagakerjaan 1,09 %, (5) Distribusi transportasi 0,22% dan (6) Lainnya 3,93 %.

Widiyanto (2010) yang berjudul “Strategi Pengembangan UMKM di Jawa Tengah” bertujuan untuk mengkaji mengenai adaptasi teknologi, modal kerja, pemasaran, inovasi, wirausaha, dan akses modal kerja dalam rangka membangun strategi pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Dari hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis deskriptif kuantitatif, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Potensi UMKM di Provinsi Jawa Tengah terletak pada sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan. Keterbatasan inovasi dan tingkat adaptasi cukup tinggi. Sektor unggulan adalah industri pengolahan kreatif karena tingkat replikasi pesaing sangat rendah dan mampu menjadi *icon product* atau *branding*. Keterbatasan UMKM dalam menghadapi keunggulan kompetitif adalah ekspansi pasar, aksesibilitas keuangan ke perbankan, kemampuan SDM rendah.

Sriyana (2010) dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul” bertujuan mengkaji tentang bagaimana variabel pemasaran, permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, alat produksi, penyerapan tenaga kerja, serta rencana pengembangan usaha dalam menunjang strategi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat analisis statistic deskriptif maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: masalah yang dihadapi UKM adalah pemasaran, permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, alat produksi, penyerapan tenaga kerja, rencana pengembangan usaha. Strategi pengembangan diperlukan dukungan dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dinas terkait. Diperlukan adanya percepatan transformasi UKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi.

Munizu (2010) yang berjudul “Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan” bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta pengaruhnya terhadap kinerja UMK. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* memberikan hasil sebagai

berikut: bahwa faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah, sosial ekonomi, dan budaya memiliki pengaruh positif 98%, sedangkan faktor internal adalah SDM, permodalan, teknik produksi, pemasaran memiliki pengaruh positif 79,2%.

Heather Banham (2010) dalam *External Environmental Analysis For Small and Medium Enterprises*. Dengan menggunakan metode derajat turbelensi digunakan untuk membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penilaian lingkungan mereka. Hasil penelitian: UKM banyak menghadapi tantangan dalam lingkungan bisnis. UKM perlu mensiasati perubahan jika ingin bertahan hidup dan tumbuh serta menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja UKM berhasil beradaptasi dengan perubahan kemajuan teknologi, harapan pelanggan, persyaratan pemasok, lingkungan dan meningkatnya persaingan membutuhkan perubahan organisasi.

Fera, Macchiaroli (2010) dalam *Appraisal of a New Risk Assessment Model for Small and Medium Sized Enterprises*. Penelitian ini tentang efektifitas metode penilaian resiko baru dari UKM, metode analisi menggunakan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Hasil penelitian metode penilaian resiko yang diterapkan di UKM dengan menerapkan metode kuantitatif dan kualitatif kurang efektif. Jadi, upayanya adalah mengembangkan model baru untuk mengurangi ketidakpastian dalam model lama. Model yang diusulkan adalah AHP model. Melalui AHP memungkinkan untuk menilai resiko terkait. Penerapan AHP dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam hal resiko keandalan penilaian. Penilaian resiko dengan model ini lebih baik dibanding menggunakan metode tradisional.

3. Profil UMKM Bali

Provinsi Bali memiliki luas wilayah sebesar 5.636,66 km atau 0,29% dari luas wilayah Indonesia, yang terdiri dari 9 Kabupaten Kota. Jumlah UMKM tahun 2014 sampai dengan Juni 2016 meningkat dari 177.248 unit menjadi 265.558 unit. Jumlah ini cukup banyak dan menyebar di seluruh Wilayah Kabupaten Kota di Bali. Namun demikian penyebaran lokasi usaha kecil tersebut tidak merata di 9 Kabupaten Kota di Bali (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Jumlah UMKM di Provinsi Bali Sampai dengan Juni 2016

Nomor	Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM
1	Kabupaten Jembrana	20.512
2	Kabupaten Tabanan	20.032
3	Kabupaten Badung	38.954
4	Kota Denpasar	11.515
5	Kabupaten Buleleng	11.196

6	Kabupaten Gianyar	91.511
7	Kabupaten Klungkung	9.712
8	Kabupaten Bangli	35.263
9	Kabupaten Karangasem	26.863
	Jumlah	265.558

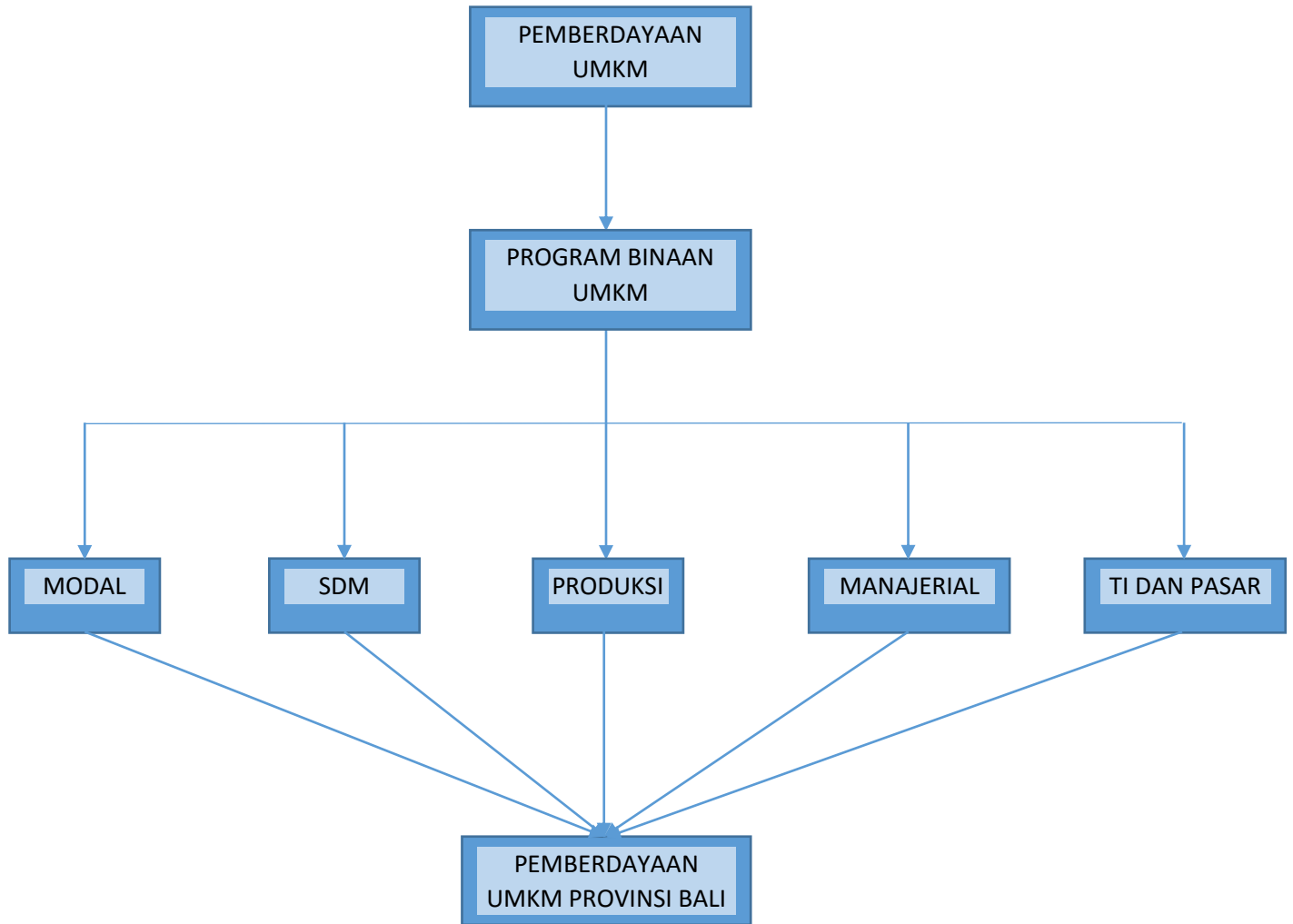
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Juni 2016.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan perkembangan UMKM paling banyak berada di Kabupaten Gianyar sebanyak 91.511 UKM, dan paling sedikit di Kabupaten Klungkung yang hanya terdapat 9.712 UKM. UKM formal paling banyak tersebar di Kabupaten Badung adalah 12.629 UKM sedangkan UKM informal paling banyak berada di Kabupaten Gianyar sebanyak 84.677 UKM.

Menurut Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Pemerintah Provinsi Bali, UMKM di Bali saat ini didominasi oleh industri kerajinan, kuliner atau makanan dan busana dari sekitar 265 ribu lebih UMKM yang ada di Bali. Kerajinan souvenir, aneka jenis makanan khas Bali, dan busana seperti kain endek, batik, hingga bahan kain kebaya. Tiga jenis usaha yang mendominasi UMKM Bali ini tersebar di semua Kabupaten Kota di Bali. Besarnya kredit UMKM meningkat dari tahun 2013 Rp 19.74 Triliun sampai dengan triwulan II 2015 sebesar Rp 24.82 Triliun (BI Provinsi Bali, Triwulan II 2015).

4. Model Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui program binaan di bidang permodalan, SDM, produksi, kemampuan teknologi informasi (TI) dan pasar serta manajerial.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2010). Sedangkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pemberdayaan UMKM digunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk *Analytical Hierarchy Process*. AHP merupakan sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi UMKM. Suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya, kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki. AHP cocok untuk menyelesaikan masalah struktur hierarki dengan kriteria majemuk

(Saaty, 2000). Populasi dalam riset ini UMKM yang tersebar di 9 Kabupaten Kota Provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *proportional stratified random sampling* (purposive) berdasarkan jumlah UMKM. Data-data yang digunakan dalam riset ini terdiri dari data primer dengan melakukan survei lapangan serta data sekunder sebagai *supporting data*.

ANALISIS PENELITIAN

1. Mengidentifikasi Permasalahan UMKM Provinsi Bali, yaitu sebagai berikut.

a. Permasalahan Internal (*basic problems*)

1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Bali. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena UKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

2) Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu, dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3) Lemahnya jaringan usaha (*Net working*) dan kemampuan penetrasi pasar (*E-Marketing*)

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena inovasi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang luas serta didukung dengan teknologi informasi yang dapat menjangkau Internasional dan promosi yang baik. disamping itu, Mentalitas Pengusaha UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri kurang. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau

berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada. Kurangnya Transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

b. Permasalahan lanjutan (*advanced problems*)

1) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini, terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3) Implikasi otonomi daerah, dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4) Implikasi perdagangan bebas, sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju

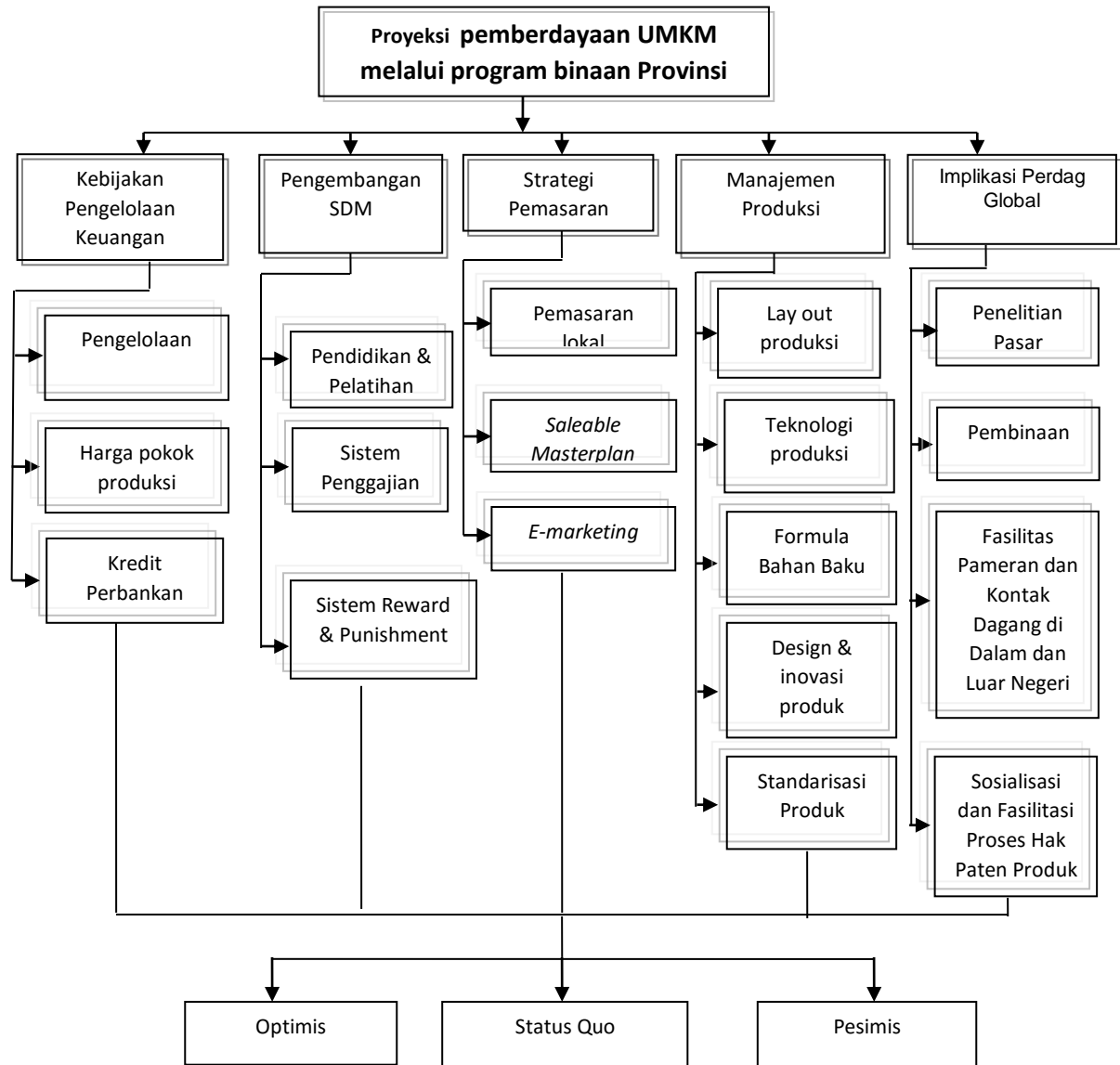
sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu maka diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan

- 5) Sifat produk dengan *lifetime* pendek, sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.
- 6) Terbatasnya akses pasar, akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) pemerintah Provinsi Bali, mengatakan, UMKM di Bali saat ini didominasi oleh industri kerajinan, kuliner atau makanan, dan busana lokal. Sekitar 265 ribu lebih UKM yang ada di Bali, didominasi adalah kerajinan souvenir, aneka jenis makanan khas Bali, dan busana seperti kain endek, batik, hingga bahan kain kebaya. Tiga jenis usaha yang mendominasi UMKM Bali ini tersebar di 9 Kabupaten Kota di Bali. Banyak UMKM berkembang pesat di Denpasar dan Badung karena pariwisata seperti di daerah Kuta. Produk unggulan UMKM Provinsi Bali, yaitu hotel melati, konstruksi bangunan, industri pengolahan hasil perikanan, industri kerajinan perak, komoditas kopi, restoran rumah makan, industri tenun endek dan songket (ATBM), industri kerajinan kayu, sawah, dan cengkeh.

c. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

Hasil pemetaan identifikasi permasalahan UMKM Provinsi Bali berada pada skenario yang cukup optimis meskipun diperlukan adanya upaya pemberdayaan secara lebih intensif dan berdaya guna dalam menghadapi berbagai tantangan terutama seiring dengan dinamisasi perekonomian dan lingkungan bisnis yang bahkan tanpa ada batas antar wilayah dan negara. Proyeksi masa depan pemberdayaan UMKM melalui program binaan di Provinsi Bali ditentukan oleh beberapa strategi dalam pengelolaan keuangan, strategi dalam pemberdayaan sumberdaya manusia, strategi dalam manajemen produksi, strategi pemasaran dan strategi pelayanan publik. Berikut adalah struktur hirarki pemberdayaan UMKM melalui program binaan di Provinsi Bali. Struktur pengembangan analisa proses Hiarki dapat diilustrasikan dalam Gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2. **Analytical Hierarchy Process (AHP) UMKM Provinsi Bali**

Analytical Hierarchy Process, diperoleh hasil pemberdayaan aspek permodalan dan aspek pemasaran menjadi faktor prioritas yang menentukan prospek UMKM di Provinsi Bali dengan aspek permodalan dan pemasaran menjadi permasalahan UMKM di 9 Kabupaten Kota Provinsi Bali dan diikuti oleh pengembangan sumberdaya manusia, pengelolaan produksi. yang berarti jawaban pelaku UMKM cukup konsisten.

d. Pemberdayaan UMKM melalui Pogram Binaan di Provinsi Bali

Pemberdayaan UMKM melalui pogram binaan dilakukan dengan bersinergi antara Pemerintah (Departemen terkait dan Perbankan) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Sosial Masyarakat (Koperasi, LPD, BUMD) dan Perguruan Tinggi (PT) berkolaborasi melalui pembinaan, kemitraan atau pendampingan (Inkubator bisnis). Selanjutnya program binaan di tiap-tiap Kabupaten Kota Provinsi Bali, sebagai berikut:

1) Kabupaten Badung

Program binaan UMKM oleh pemerintah, BUMN seperti Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai melalui Mitra Binaan (MB) bantuan modal UMKM di Kota dan 4 Kabupaten, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung. Sedangkan BTDC melalui CSR mitra binaan UMKM di 9 Kabupaten Kota sebagaimana Table 2.

Tabel 2

Jumlah kredit Melalui program Kemitraan PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) BTDC Nusa Dua Bali kepada UMKM pada Kabupaten Kota di Provinsi Bali. Periode 2009/2010 – 2013/2014

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kredit yang Terserap (Rupiah)	Jumlah UMKM (Unit)
1	Buleleng	3.272.500.000	147
2	Denpasar	2.867.500.000	157
3	Tabanan	3.025.000.000	173
4	Gianyar	2.321.000.000	133
5	Jembrana	2.536.500.000	128
6	Karangasem	2.058.000.000	130
7	Badung	3.655.500.000	197
8	Klungkung	2.272.500.000	122
9	Bangli	2.578.250.000	167
	Jumlah	24.586.750.000	1.354

Sumber: PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), 2014

2) Kabupaten Jembrana

Program binaan UMKM oleh Pemerintah, BTDC Nusa Dua Bali seperti permodalan, SDM, sistem produksi, dan pemasaran. Bentuk program binaan antar UKM (mentor) dilakukan UD. Nyoman Handycraft kerajinan cendramata alat musik di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo terhadap Urip handycrafts. Jenis produk yang diproduksi oleh kedua UKM meliputi kalimba, jimbe, maracas, tambur, tas kendang,

silovone, suara petir dan vatica. Jumlah produksi per tahun sebanyak 15.000 pcs untuk Nyoman handycrafts dan 13.000 pcs untuk Urip handycraft. Bentuk program binaan terhadap UKM Nyoman handycrafts dan Urip handycrafts adalah dalam pengelolaan usaha (manajemen). Tahun pertama dilaksanakan adalah (1) mengarahkan dan mendampingi UKM dalam penanaman labu untuk menekan pembelian bahan baku dari luar daerah, (2) meningkatkan kapasitas produksi dengan memberikan bantuan peralatan, (3) membuat standar operasional prosedur bahan baku, (4) mendampingi UKM menata ruang kerja yang memberikan jaminan kesehatan, (5) mendampingi UKM menata show room, dan (6) memperbaiki sistem pembukuan.

3) Kabupaten Tabanan

Program binaan UMKM oleh Pemerintah tentang Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), BTDC Nusa Dua dan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Bentuk program binaan melalui BPD seperti yang disampaikan oleh Wayan Maryartha menjadi nasabah binaan BPD Cabang Tabanan sebagai *pengelola Okan Jaya Grosir yang menjual berbagai jenis busana adat Bali. UMKM di Kabupaten Tabanan selama ini belum seluruhnya mampu dalam pengelolaan manajemen usaha, khususnya terkait dengan pencatatan laporan transaksi usaha dan sejenisnya.*

4) Kota Denpasar

Program binaan UMKM oleh Pemerintah, Perbankan, LSM, PT dan BUMN yaitu BTDC Nusa Dua dan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dalam bentuk pemberian kredit dan mitra binaan terhadap UMKM. UKM atas nama I Wayan Suparta pedagang air mineral, Darmiati pedagang jajan pasar, Bapak Suyanto pedagang Industri Non Pertanian, dan Pak Alek pedagang Furniture bentuk program binaan di bidang permodalan, E-marketing, dan manajerial.

5) Kabupaten Gianyar

Program binaan UMKM oleh Pemerintah, BTDC, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, dan PT. ARK Ekspres Internasional binaan dibidang branding, pengiriman produk dan pelatihan SDM pelaku UMKM.

6) Kabupaten Klungkung

Program binaan UMKM oleh Pemerintah, Perbankan seperti Desa kramas sebagai kampung program binaan BNI dan industri kerajinan endek dan songket (ATBM) binaan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bali, BTDC, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

7) Kabupaten Buleleng

Program pembinaan UMKM oleh Pemerintah, BTDC, Perbankan, LSM, PT terhadap UMKM di bidang permodalan, SDM, Pemasaran, Produksi, Teknologi Informasi, dan manajerial pengelolaan UMKM.

8) Kabupaten Bangli

Program binaan UMKM oleh Pemerintah seperti pembinaan dan fasilitasi desain kemasan dan *labeling* olahan pangan pada pengerajin Kripik Krenyes dan Kripik Santi di Br. Kayuambua, Desa Tiga Susut dan olahan loloh temu kunyit di Desa Penglipuran, Kelurahan Kubu, Pelatihan kerajinan kayu membuat souvenir dan hiasan dinding bertemakan Geopark dan Gunung Batur dengan cara finishing menggunakan air brush di Desa Abuan Kabupaten Bangli.

9) Kabupaten Karangasem

Program binaan UMKM oleh Pemerintahan dan BTDC terhadap industri kerajinan endek dan songket (ATBM) Desa Sidemen dan Desa Tenganan Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dirumuskan kebijakan, antara lain (1) program binaan UMKM, baik di tingkat Kabupaten / Kota maupun di tingkat Provinsi hendaknya terus dikembangkan dan dibina secara intensif oleh para pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Perbankan, BUMN, Koperasi, LPD, BUMD, dan PT dengan memberikan pelatihan teknis, manajemen usaha, kewirausahaan, teknologi informasi, akses modal dan E-Marketing sehingga mampu mandiri; (2) Produk UMKM potensial di setiap Kabupaten Kota perlu dikembangkan melalui usaha ekstensifikasi dan intensifikasi sehingga meningkat menjadi produk unggulan; (3) Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, penyederhanaan prosedur perijinan, murah dan cepat melalui satu atap.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh premis program binaan UMKM *dan Analytical Hierarchy process* yang memberikan hasil maksimal untuk pemberdayaan secara ekonomi UMKM di Provinsi Bali. Dengan pemberdayaan tersebut akan memberikan peningkatan secara signifikan pertumbuhan ekonomi pasar domestik dan Internasional Provinsi Bali. Kendala yang dihadapi UMKM ditingkat hulu yaitu modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), proses produksi, SDM, kekurangan pasokan bahan baku, dan pemasaran. Sedangkan kendala di hilir ditemukan adanya kurangnya dukungan dari Pemerintah dalam proses pemasaran dan

alokasi sarana pameran produk UMKM di Pulau Bali, tingkat nasional, dan Internasional yang diperoleh dari analisis identifikasi masalah UMKM.

Hasil Analytical Hierarchy Process, diperoleh pemberdayaan UMKM melalui program binaa atau mitra binaan baik dari hulu sampai ke hilir seperti modal dan pemasaran menjadi faktor prioritas yang menentukan prospek UMKM di Provinsi Bali dengan aspek permodalan dan pemasaran menjadi permasalahan UMKM di 9 Kabupaten Kota Provinsi Bali dan diikuti oleh pemberdayaan sumberdaya manusia, sistem produksi, dan manajerial UMKM di Provinsi Bali.

Program binaan UMKM di Provinsi Bali dilakukan secara bersinergi dengan pemerintah, Perbankan, BUMN, Koperasi, LPD, BUMD, Perguruan Tinggi dan berkolaborasi melalui Inkubator bisnis.

PENELITIAN SELANJUTNYA

Berdasarkan hasil penelitian ini, ke depannya arah penelitian adalah ingin meneliti tentang strategi pemasaran produk UMKM berbasis lokal genius, agar dapat unggul dan berdaya saing secara Nasional dan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinaitwe, J.K. (2006), "Factors constraining the growth and survival of small scale businesses: a developing countries analysis", *Journal of American Academy of Business*, Cambridge, Vol. 8 No. 2, pp. 167-78
- Awang, A., Khalid, S. A., Yusof, A. A., Mohamed Kassim, K., Ismail, M., Shekh Zain, R., & Sintha Madar, A.R. (2009). Entrepreneurial Orientation and Performance Relations of Malaysian Bumiputera SMEs: The Impact of Some Perceived Environmental Factors. *International Journal of Business and Management*, 4(9), 84-96
- Barringer, R. et al 2004. *The Creative Economy in Maine: Measurement and Analysis*. England: New England Foundation for the Arts and Maine Arts Commition. University of Southern Maine
- BPS, (2015.) *Profil Usaha Kecil Menengah Tidak Berbadan Hukum, Indonesia*. Survei Usaha Terintegrasi. Jakarta: BPS
- Bagozzi, R., Baumgartner, H. and Yi, Y. (1989), 'An investigation into the role of intentions as mediators of the attitude-behavior relationship' *Journal of Economic Psychology*, 10 35-62
- Bank Indonesia, 2015. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional*. Triwulan II. Provinsi Bali

- Bank Indonesia Denpasar bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana. (2011). Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan UMKM di Provinsi Bali
- Bank BRI Denpasar bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar (2016). Kajian Ekonomi Regional Kota Denpasar dan Kabupaten Badung di Provinsi Bali
- CIRDAP. (1984). People's Participation in Rural Development: An Overview of South and South East Asian Experiences. Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific. Bangladesh: Comilla
- Cohen, J. M. and N. T. Uphoff. (1977). Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. Rural Development Monograph No. 2. Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University. New York: Ithaca
- Cooper, A. C. and Gascon, F, (1992) 'Entrepreneurs, processes of founding and new-firm performance', in The state of the art of entrepreneurship, (eds.) D Sexton and J Kasarda, PWS-Kent, Boston
- Covin, J. G., & Covin, T. J. (1990). Competitive aggressiveness, environmental context, and small firm performance. *Entrepreneurship Theory dan Practice*, 14, 35-50
- Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 16(1), 7-24
- Covin, J. G., Green, K. M., & Slevin, D. P. (2006). Strategic process effects on the entrepreneurial orientation-sales growth relationship. *Entrepreneurship Theory & Practice*, 30(1), 57-81
- Covin, J. G., Slevin, D. P. and Schultz, R. L. (1994), 'implementing strategic missions: Effective strategic, structural and tactical choices.' *Journal of Management Studies*, 31 (3) 481-505
- Dean, C. C. (1993). Corporate entrepreneurship: Strategic and structural correlates and impact on the global presence of United States firms. Unpublished doctoral dissertation, University of North Texas, Denton
- Dess, G. G., & Lumpkin, G. T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. *Academy of Management Executive*, 19(1), 147-156
- Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Covin, J. G. (1997). Entrepreneurial strategy making and firm performance: Tests of contingency and configurational models. *Strategic Management Journal*, 18(9), 677-695
- Dia, M., (1996), African management in the 1990s and Beyond: Reconciling Indigenous and Transplant Institutions. The World Bank, Washington, DC

- Erwidodo. 1999. Modernisasi dari Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskitnan. Jakarta. PT. Bina Rena Pariwara
- Fera, Macchiaroli (2010) dalam *Appraisal of a New Risk Assessment Model for Small and Medium Sized Enterprises*
- Heather Banham (2010) dalam *External Environmental Analysis For Small and Medium Enterprises*
- Gibb, A.A. (1993), "The enterprise culture and education. understanding enterprise education and its links with small business, entrepreneurship and wider educational goals", *International Small Business Journal*, Vol. 11 No. 3, pp. 11-34
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi. Jakarta. Buletin Alumni SESPA. Edisi Keempat
- Maine Departemen of Economy and Communities. 2006. *Maine's Creative Economy: Community Handbook*. Augusta Maine: State of Maine Office of The Governor 1 State House Station
- Munizu (2010) yang berjudul "Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan"
- Mubyarto, 2002. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Marimin. (2004). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Grasindo. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Oakley, P. and D. Marsden. (1984). *Approaches to Participation in Rural Development*. Published on Behalf of the ACC Task Force on Rural Development
- Omar, H; A. Kuswono; I. Brahmantio; T. Fizzanty; and L.E. Mustika. (2001). *Teknologi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Kebutuhan Mendatang*. ITB: Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri
- Saaty, T.L. 1980. *The Analytical Hierarchy Process*. McGraw Hill Inc., New York
- Sahil, M.R.dan T. Salim. (1999). *Strategi Pemilihan Teknologi untuk Pengembangan UKM (Bahan Diskusi)*. Materi Pelatihan Alih Teknologi di Daerah Pedesaan. LIPI: Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- Sugiyanto, C. (2007). *Strategi Penyusunan Komoditi Unggulan Daerah Dalam Website google.com: Komoditi Unggulan*
- Sabirin, S. (2001). *Pemanfaatan Kredit Mikro untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat di dalam Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Lustrum IX Universitas Andalas, Padang, 13 September 2001

Sriyana (2010) dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul”

iMulyati Tri Subari, (2004). Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Widiyanto (2010) yang berjudul “Strategi Pengembangan UMKM di Jawa Tengah

Waddimba, J. 1979. Some Participatory Aspects of Programmes to Involve the Poor in Development. Geneva: United Nations Institute for Social Development

Winarni, Sri. 2006. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan. Infokop Nomor 29 Tahun XXII

UNDP-UNCTAD. 2008. Summary Creative Economic Report. USA: United Nations

Penulis adalah:

- 1) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, email: nyomansunariani@gmail.com
- 2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, email: okagorda@gmail.com
- 3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, email: raimahaputra@undiknas.ac.id